

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
LEMBAR TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Definisi Operasional	5
1.5. Metode Penelitian	8
1.6. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Negara Hukum	13
2.1.1. Sejarah Perkembangan Negara Hukum	14
2.1.2. Macam-Macam Konsep Negara Hukum	19
2.1.3. Negara Hukum Indonesia	23
2.2. Hirarki Norma (<i>Stufentheory</i>)	26

2.3. Konstitusi	36
2.3.1. Istilah dan Pengertian Konstitusi	36
2.3.2. Nilai dan Sifat Konstitusi	39
2.3.3. Tujuan Konstitusi	40
2.3.4. Sejarah Perkembangan Konstitusi di Indonesia	40
A. UUD 1945	40
B. UUD RIS 1949-1950.....	42
C. UUDS 1950.....	43
D. Kembali ke UUD 1945.....	44
2.4. Pelimpahan Kewenangan	44

BAB III TINJAUAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA OLEH KPU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

3.1. Sejarah Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)	48
3.2. Kewenangan Penyelenggaraan Pilkada Oleh KPU Provinsi Dan Kabupaten/Kota	55
3.3. Kewenangan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Setelah Masuk Dalam Rezim Pemilihan Umum Oleh KPU Provinsi Dan Kabupaten/Kota	57

BAB IV ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 97/PUU-XI/2013

4.1. Pokok Permohonan	61
4.2. Pokok Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan	63
4.3. Implikasi Putusan	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

**LAMPIRAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR : 97/PUU-XI/2013**